

KONTESTASI ANTARA KEPEMILIKAN SILANG DENGAN ISI PEMBERITAAN MEDIA MASSA

Studi tentang Kasus *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* Fiktif terkait Hary Tanoesoedibjo dalam Pemberitaan RCTI, TRIJAYA 104,6 FM dan TRUST

Based on the concept of contested terrain formulated by Douglas Kellner, this research applied Robert K. Yin's case study method and Ganson Modigliani's framing analysis. It concludes that media owners do control the contestation. Newsrooms are intervened for the sake of the media baron.

Di Indonesia sejarah mencatat sekian banyak daftar suram perjalanan ruang publik yang telah sesak oleh pergeseran kepentingan privat para pemilik media massa. Ternyata, di era reformasi pun kebebasan pers hanya dapat dinikmati dalam jenjang euforia belaka. Setelahnya, pers kembali bukan milik publik. Hary Tanoesoedibjo, taipan media massa, pemilik PT Media Nusantara Citra (MNC) yang menguasai saham RCTI, Trijaya FM, dan Trust sempat termasuk dalam daftar suram itu.

Pada tahun 2006, arus berita mengenai kasus NCD (*Negotiable Certificate Of Deposit*) fiktif terkait Hary Tanoesoedibjo, demikian deras dibicarakan di lintas media, baik cetak maupun elektronik, berkaitan dengan kemungkinan tindak pidana korupsi yang bisa menimbulkan kerugian negara. Secara kasat mata, media massa nasional umumnya menempatkan Hary Tanoesoedibjo sebagai

Penulis staf pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu-Buana. Artikel penelitian ini ringkasan tesis penulis untuk program pascasarjana Universitas Indonesia.

Brutus.¹ Hal ini berbeda secara diametral dengan pemberitaan media massa yang kepemilikan silangnya berada di tangan Hary Tanoesoedibjo. Oleh sebab itu, menarik kiranya kita menelusuri kontestasi di balik pemberitaan yang berbeda secara diametral itu.

■ KERANGKA TEORITIS

☞ Kontestasi

Douglas Kellner merupakan ilmuwan yang kali pertama menyebut penyiaran — dan tentu media massa — sebagai ranah yang dikontestasikan (*contested terrain*). Dalam buku *Television and The Crisis of Democracy* (1990), Kellner mengkritik penyiaran televisi Amerika Serikat bahwa dominasi pemilik modal sangat berpengaruh terhadap apa yang tampak di televisi. Pandangan-pandangan dari yang sedang tidak berkuasa, sebagai contoh, secara perlahan, tapi pasti, semakin tersingkir dan kalah dalam proses kontestasi. Kontestasi ini terus berlangsung meskipun demokrasi politik masih kuat dan memungkinkan terjadinya pergantian penguasa. Kellner mengkhawatirkan demokrasi politik (dan juga sosial ekonomi) akan mengalami krisis bila terjadi kolusi atau setidaknya kerja sama antara pemilik modal di perusahaan-perusahaan televisi dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pemikiran Douglas Kellner ini koreksi atas teori-teori kritis dari generasi pertama yang diwarnai oleh pemikiran Horkheimer dan Adorno dari Mazhab Frankfurt tentang teorisasi media yang kemudian terkenal dengan istilah "*the culture industry*."

Menurut Horkheimer dan Adorno, media penyiaran sebagai "*the culture industry*" terwujud dalam struktur monolitik yang sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan-perusahaan kapitalistik. Perusahaan-perusahaan itu memproduksi budaya massa yang menjunjung manipulasi ideologis, penuh reifikasi, dan mengentaskan komodifikasi. Media massa tidak lain merupakan medium para kapitalis yang mereproduksi ideologi dominan yang menyodorkan ide-ide dan gaya hidup mereka kepada khalayak secara mempesona. Hasilnya, khalayak merasa itulah yang mereka mau dan butuhkan.

Kellner menolak simpulan struktural yang monolitik kedua ilmuwan itu. Meski sepaham bahwa dominasi pemilik modal menguat, Kellner cenderung melihat media penyiaran sebagai arena yang diperebutkan pelbagai pihak dalam kelas pemilik modal sendiri, pihak-pihak dalam politik kekuasaan, dan pihak-pihak yang berpengaruh di masyarakat, atau bisa juga antara pemilik modal,

pemerintah, dan masyarakat. Domain yang diperebutkan inilah yang disebut Kellner sebagai *contested terrain*. Tidak semata di ranah star, tapi juga ranah media massa.

■ METODOLOGI

☉ Studi Kasus

Metode yang digunakan adalah studi kasus menurut Robert K. Yin (2004). Yin mendefinisikan bahwa studi kasus (1) menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila (2) batas-batas antara fenomena dengan konteks tak tampak dengan tegas, dan (3) multisumber bukti dimanfaatkan. Rancangan yang dipakai adalah multikasus holistik. Menurut Yin (1994:46), multikasus holistik digunakan apabila ada beberapa objek pada suatu level. Ini dapat dipakai untuk meneliti PT Media Nusantara Citra sebagai sebuah *subholding* yang membawahkan beberapa media massa seperti *RCTI*, *Trijaya FM* dan *Majalah Trust*.

☉ Validitas

Dalam perspektif teori kritis, validitas sebuah penelitian ditentukan oleh keutuhan (*holistic*) dan *historical situatedness* atas objek. Untuk itu, saya berupaya memberikan gambaran sehingga terhenti pada titik (*still*) kepemilikan silang media massa dan pemberitaan kasus NCD yang melibatkan Hary Tanoesoedibjo di *RCTI*, *Trijaya FM* dan *Trust*. Untuk melihat apakah hasil penelitian ini valid atau tidak digunakan metode triangulasi yang bertujuan menguji bukti-bukti baru dengan bukti-bukti lama dianggap kuat.

■ HISTORICAL SITUATEDNESS

☉ *Late Capitalism*²: Pemicu Kepemilikan Silang dan Dominasi Media Massa

Istilah *late capitalism* atau kapitalisme lanjut secara implisit menunjukkan bahwa sistem-sistem kapitalisme hanyalah suatu bentuk perkembangan masyarakat yang bisa berakhir. Menurut Habermas (dalam Hardiman, 1993), dengan tak mengecualikan sistem kapitalisme, perkembangan masyarakat berlangsung melalui kontradiksi-kontradiksi atau krisis-krisis. Dengan demikian, Habermas tidak hanya melihat perlunya, melainkan juga mungkin suatu transformasi sosial dalam masyarakat dewasa ini. Kondisi-kondisi faktual yang mengarah pada transformasi sosial itu adalah krisis-krisis dalam masyarakat kapitalis lanjut itu.

Habermas menyebut sistem ekonomi masyarakat industri maju sebagai kapitalisme lanjut. Ada dua ciri struktural pokok yang membedakan sistem ini dari sistem liberal. Pertama, proses pemusatan modal yang menghasilkan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional dalam bentuk oligopoli-oligopoli. Kedua, repolitisasi massa, sebagai ganti depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis-liberal. Repolitisasi ini usaha untuk mengatasi krisis permanen dalam proses akumulasi modal yang sudah dimulai dalam masyarakat kapitalis-liberal. Dengan kata lain, negara campur tangan dalam pasar untuk mengatasi kesenjangan yang menganga. Ciri kompetitif kapitalisme awal berakhir dengan terbentuknya struktur pasar oligopolis, dan menurut Habermas, bersamaan dengan itu intervensi negara menyudahi kapitalisme liberal itu sendiri.

Lebih lanjut, Hardiman mengatakan bahwa dalam krisis legitimasi, Habermas memberikan serentetan ciri lain. Dalam sistem ekonominya, terjadi pembedaan antara sektor-sektor swasta dan publik. Sektor swasta berorientasi pada pasar dan terbagi menjadi dua subsektor. Satu sektor masih diatur kompetisi, padat karya, tenaga kerja kurang terorganisasi, sedangkan sektor lainnya ditentukan oleh pasar oligopoli. Adapun sektor publik, misalnya industri senjata dan teknologi angkasa, tidak berorientasi pasar, tapi langsung ditangani negara, dan padat modal.

Tentu, ciri ini menggambarkan bahwa di dunia global telah terjadi penjamuran eksistensi sektor-sektor swasta maupun publik di segala bidang industri, termasuk industri media massa.

Di Indonesia industri media massa ini berkembang dengan cara yang cukup unik. Ketika Orde Baru bertahta, media cetak mendapatkan cukup tempat dan kesempatan berkembangbiak asalkan isinya tidak menyerang rezim. Jika terjadi, akan ada pembatalan SIUPP atau pembredelan. Di media penyiaran, cukup lama TVRI memonopoli hak siar hingga pada akhirnya RCTI lahir sebagai stasiun televisi swasta.

■ TEMUAN

■ *Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Fiktif* Terkait Hary Tanoesoedibjo

Dalam dunia perbankan, *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* adalah simpanan dana nasabah dalam bentuk sertifikat deposito dengan batasan nominal minimal Rp5 miliar dengan penambahan setiap kelipatan Rp1 miliar ([Http://www.members.bumn-ri.com](http://www.members.bumn-ri.com)). NCD ini dapat diperdagangkan oleh pihak yang memilikinya.

Kasus NCD fiktif Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoë) bermula pada tahun 1999 ketika PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ingin berinvestasi melalui jual beli surat berharga lewat perantara PT Bhakti Investama, dengan Hary Tanoë sebagai direktur utama.

Bhakti menawari CMNP surat berharga dari Drosophila Enterprise, sebuah perusahaan milik Hary Tanoë yang berkedudukan di Singapura. Maka, pada tanggal 12 Mei 1999, CMNP pun sepakat menjual beberapa surat berharga (obligasi CMNP II tahun 1997 senilai Rp189 miliar dan Medium Term Note Bank CIC senilai Rp153,5 miliar) ke Drosophila. Drosophila akan membayar dengan NCD yang diterbitkan Unibank pada 26 Mei 1999. Nilainya US\$28 juta, dan jatuh tempo pada 20 Mei 2002. Pihak CMNP diwakili oleh Tito Sulistio (direktur keuangan) dan Teddy Kharsadi (direktur operasional).

Yang aneh, nilai transaksinya besar, tapi Tito dan Teddy melakukannya tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan, pada RUPS 1999 pun transaksi pembelian NCD itu juga tidak dilaporkan. Baru pada bulan Maret 2000 transaksi itu tercium.

Belakangan, transaksi ini menimbulkan masalah. Unibank, sebagai penerbit sertifikat deposito itu sejak bulan Oktober 2001 dibekukan Bank Indonesia dan menjadi pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Upaya CMNP mencairkan surat utang itu sebulan kemudian menemui kuldesak.

BPPN kemudian mengumumkan bahwa rekening NCD yang dikeluarkan Unibank itu melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu sebabnya ia tidak masuk dalam skema penjaminan pemerintah. Karena itu pulalah pemerintah tidak menjamin pembayarannya. Keputusan BPPN diperkuat surat rahasia BI yang dikirimkan kepada CMNP pada bulan Januari 2003. Di situ disebutkan, sertifikat deposito itu tidak tercatat dalam laporan simpanan berjangka bulanan Unibank untuk posisi Januari 2001. Sejumlah aturan bank sentral pun dilanggar. NCD bermata uang dollar Amerika itu berjangka waktu tiga tahun. Padahal berdasarkan aturan BI, jangka waktu deposito selama-lamanya 24 bulan dan harus bernominal rupiah.

Kasus NCD CMNP yang fiktif muncul kembali ke permukaan setelah Egy Sudjana melaporkan hal ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 11 Januari 2006. Selain pemilik PT Bhakti Investama, Hary juga tercatat sebagai pemilik Drosophila. Hary tercatat sebagai pemegang saham sekaligus direktur di perusahaan Singapura itu

sejak 7 Desember 1998. Berdasarkan kenyataan itu, dalam laporan yang masuk KPK, Kejaksaan Agung dan Markas Besar Polri disebutkan bahwa transaksi itu mengandung konflik kepentingan, selain menyebabkan kerugian Negara. Sebab, akibat surat utang fiktif itu, CMNP bertahun-tahun tak bisa membagi deviden ke pemegang saham dan tak mampu membayar utangnya. Padahal, dua pemegang sahamnya adalah perusahaan milik negara, yaitu PT Jasa Marga dan PT Krakatau Steel (*Tempo*, 19/02).

Posisi Hary Tanoesoedibjo dalam Imperium Bisnisnya

Tabel berikut menggambarkan posisi Hary Tanoesoedibjo dalam imperium bisnisnya yang terkait dengan kasus NCD fiktif.

Tabel 1
Posisi Hary Tanoesoedibjo

	Nama Perusahaan	Posisi	Keterangan
1	PT Bimantara Citra Tbk	Direktur utama	<i> Holding Company.</i>
2	PT Media Nusantara Citra		Sebanyak 100% sahamnya dimiliki PT Bimantara Citra Tbk.
3	RCTI	Direktur utama	Media televisi.
4	TV Global	Komisaris utama	Media televisi.
5	TPI	Komisaris	Media televisi.
6	MNC Networks		<ul style="list-style-type: none"> Melalui MNC, Bimantara memiliki 95% saham di MNC Networks. Merupakan jaringan media radio
7	Koran <i>Seputar Indonesia</i> dan <i>Tabloid Genie</i>		Di bawah MNC.
8	Majalah <i>Trust</i>		Di bawah MNC, tapi sedang dalam proses untuk ditempatkan dibawah MNI atau MNI Global.
9	PT Bhakti Investama	Direktur utama	<ul style="list-style-type: none"> Mantan (direktur utama). Merupakan perusahaan sekuritas yang menjadi broker transaksi antara CMNP dan Drosophila Enterprise. Merupakan perusahaan yang pernah digunakan Hary Tanoesoedibjo untuk memiliki sejumlah saham di Bimantara
10	Drosophila Enterprise Pte Ltd, Singapura	Pemegang Saham dan Direktur	Merupakan perusahaan yang membayar transaksi kepada CMNP dengan NCD, yang belakangan dituding fiktif.
11	PT Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk		Sejak Agustus 2002, melalui Bhakti Investama Hary Tanoesoedibjo memiliki saham CMNP dengan membeli 13,7% saham milik Steady Safe.

❑ Pemberitaan NCD Fiktif di RCTI

Dalam pemberitaan di RCTI, kasus NCD fiktif Hary Tanoe muncul secara khusus dalam *Dialog Khusus* pada tanggal 20 Februari 2006. Dalam tayangan berjudul “Kontroversi NCD Bodong” selama 1 jam 6 menit 59 detik itu, saya cermati berulang kali, terdapat banyak hal tak lazim yang mengarah ke upaya pemilik media menggiring opini publik dengan membuat isi dialog yang memihak bahkan membela. Untuk mengetahui ideologi macam apa yang diusung di dalamnya, saya menggunakan perangkat analisis pembingkai Gamson dan Modigliani.

Bingkai yang dikonstruksi dalam tayangan itu adalah “NCD Milik CMNP tidak fiktif, Hary Tanoesoedibjo tidak bersalah.” Di dalamnya terdapat *metaphors* atau perumpamaan yang memberikan ‘pengarahan’ kepada khalayak untuk memaknai bahwa NCD yang bermasalah itu tidak fiktif atau tidak bodong, yaitu “kembar siam, *default*.”

Dalam terminologi umum masyarakat awam, kembar siam adalah sesuatu yang sama rupa, tapi saling *dempet*, rapat berhimpitan. Perumpamaan ini digunakan untuk menggambarkan bahwa NCD yang dipegang pihak tertentu bisa saja dimiliki juga oleh pihak lain dan bentuk fisik NCD itu dimiliki tiap-tiap pihak. Mereka bisa saling klaim. Ini bisa terjadi bila ada siasat bisnis yang licik dan merugikan klien. Adapun istilah *default* digunakan dengan maksud memperhalus makna. Jika fiktif, berarti NCD itu tidak ada, uangnya juga tidak ada yang disetorkan. Namun, jika hanya *default*, NCD sudah ditransfer sejumlah uang sebelum penerbitannya, dan tidak bisa dicairkan saja.

Catchphrases ditandai dengan slogan yang kontras dengan isu yang berkembang di media massa, yaitu bahwa “NCD tidak fiktif atau bodong,” “tidak merugikan negara.” Kedua pernyataan yang terus-menerus diucapkan selama dialog berlangsung. Adapun *exemplar* pembingkai tersebut adalah sebagai berikut.

● NCD tidak fiktif atau bodong

1. Kita harus hati-hati dalam menggunakan istilah bodong, fiktif, atau aspal. NCD itu diterbitkan secara resmi dan sah oleh Unibank. Itu satu. Kedua, ditangani oleh pejabat bank yang berwenang. Ketiga, bank secara resmi menerimanya dan dibukukan di buku bank. Nanti, bisa saya sampaikan *embeded* yang bisa mendukung ini. Keempat, lebih daripada itu, karena ini adalah instrumen perdana, yang pertama kali diterbitkan Unibank, Unibank juga memberikan *Letter of Undertaking* (Hary Tanoesoedibjo).
2. Saya melihat tidak (bodong) ya. Saya melihat bahwa dokumen yang paling kuat adalah laporan keuangan yang di-submit ke Bapepam, BEJ. Itu dokumen

nggak bisa di-back debit karena tiap periode, akhir tahun atau awal tahun berikutnya, itu perusahaan atau bank (semua perusahaan yang *go public* ya) harus melaporkan ke BEJ, ke Bapepam. Dimiliki oleh banyak investor publik mereka. Dengan kata lain apa? *Nggak bisa kolusi kalau itu* (Goel Stauw Hong).

3. Karena sifat instrumen keuangan ini 'kan harus memiliki *underline asset* yang mengikat kepada instrumen yang dikeluarkan. **Bagaimana mungkin kertas dikeluarkan tapi tak ada uang, nilai ekonomisnya.** Setidaknya secara aspek finansial. Itu sudah kuat (Indra Safitri).
4. **Sepanjang itu ada aliran uang** masuk dari Drosophila ke Unibank dan Unibank mencatat dan melaporkan kepada Bank Indonesia, **itu sah** (Eko B. Supriyanto).
5. **NCD tersebut tidak bodong dan tidak fiktif.** (Lucas, SH)
6. Saya bingung. Saya orang yang paling bingung dengan unsur kerugian negara. Karena kerugian negara sepanjang yang saya tahu adalah APBN, APBD yang ramal-ramai kemarin. Tapi, sepanjang itu masalah PT, itu harus tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Kendati PT-nya itu dimiliki negara, maka batas kepemilikannya sepanjang saham yang diberikan. Uang publik dimasukkan ke PT, ini sudah dikatakan bahwa ini tidak bisa membayar deviden, itu kerugian negara. Menurut saya, tidak itu bahwa itu unsur kerugian negara. **Dan saya tidak lihat bahwa itu ada unsur kerugian negara sepanjang PT itu mengerjakan, berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.** Karena ini uang privat, sudah bukan uang publik lagi (Eko B. Supriyanto).

● **Tidak merugikan negara**

1. ... Kalau kita menganggap misalnya nanti kasus ini kerugian negara, bagaimana kalau ada suatu keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrase kasus Graha Bodas, negara membayar. **Apakah keputusan itu dianggap sebagai merugikan negara?** Jadi analognya tidak tepat (Indra Safitri).
2. Perlu hati-hati kita untuk mendefinisikan akibat dari transaksi itu kemudian menimbulkan, **mungkin, dia berdampak pada saham dan dianggap sebagai kerugian negara.** Itu terlalu luas (Indra Safitri).
3. Jadi, kalau dikatakan, misalnya, **kerugian negara karena nggak bayar deviden, itu keliru** karena tanpa ada kasus NCD pun itu akan ada pembayaran deviden karena ada restrukturisasi hutang (Goel Stauw Hong).

● **Hary Tanoë Tidak Bersalah**

Memang ini 'kan dibuat sedemikian rupa. **Dikesankan seakan-akan saya itu menjual NCD bodong tanpa mengungkap fakta transaksi yang sebenarnya terjadi.** ... Yang jelas saya merasa yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memang memiliki motivasi untuk menjatuhkan saya. Saya yakin tentunya ada tujuan tertentu dengan tujuan komersial, *business motive* (Hary Tanoesoedibjo).

Ada tiga hal utama yang diperjuangkan dalam Dialog Khusus ini. Pertama, NCD milik CMNP tidak bodong atau fiktif. Dalam hal pertama ini pun ada dua poin utama yang ingin disampaikan, yakni NCD itu milik CMNP, jadi tidak tepat kiranya jika disebutkan NCD Unibank atau NCD fiktif dan poin lainnya NCD ini tidak bodong

atau fiktif. Kedua, tidak merugikan negara. Makanya, ada "segmen tayangan khusus" yang membahas masalah ini. Terakhir, Hary Tanoesoedibjo tidak bersalah. Sebenarnya intisari semua upaya dalam Dialog Khusus tanggal 20 Februari 2006 itu, menurut saya, adalah hal yang terakhir ini bahwa supaya publik menyimpulkan Hary Tanoesoedibjo tidak bersalah.

Depiction atau penggambaran atau pelukisan suatu isu yang konotatif dalam *Dialog Khusus*: "Kontroversi NCD Bodong adalah NCD Bodong itu sendiri." Tudingan bodong atau fiktif ini sangat tidak disukai oleh Hary Tanoesoedibjo. Karena makna konotasinya yang buruk, menurutnya, seolah ia telah berbuat curang dalam bisnis.

Demi menguatkan opini dan argumen, banyak sekali *visual images* yang ditampilkan berupa dokumen-dokumen, bagan, potongan peristiwa yang mendukung.

Pertama, *opening bumper* dengan tulisan "DIALOG KHUSUS KONTROVERSI NCD BODONG." Judul dibuat dengan huruf kapital dari varian Arial. Tulisan "KONTROVERSI NCD BODONG" berwarna merah dengan Arial yang berukuran lebih kecil daripada "DIALOG KHUSUS." Secara positif, warna merah mengandung arti cinta, keberanian, agresif, merdeka, kehangatan. Secara negatif, warna merah mengandung bahaya, perang, iblis, darah, anarki, siksaan. ([Http://www.baballash.com](http://www.baballash.com)). Adapun makna DIALOG KHUSUS yang berwarna biru dengan efek cahaya di sekelilingnya. Secara umum, biru dipandang maskulin, warna jantan, seperti ingin menunjukkan ketegasan. Jika disepadankan, judul mengandung makna bahwa tayangan itu dimaksudkan secara terus-terang untuk membawa opini dari adanya kontraversi "yang membahayakan" ke arah yang — menurut pihak Hary Tanoe — "mencerahkan."

Setelah itu, muncul *soundbite* berupa tayangan Eggy Sudjana melaporkan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus NCD bodong milik CMNP yang dikeluarkan oleh Unibank. Visual ini diposisikan sebagai *trigger*, pemicu. Kemunculan Eggy Sudjana ini berlangsung hampir satu segmen. Rupanya durasi yang lumayan itu, kemudian saya ketahui, diperuntukkan bagi alasan tidak diundangnya narasumber yang kontra karena dianggap sudah cukup mewakili.

Lalu, gambar Unibank yang telah dibekukan, gambar gedung Bank Indonesia, dan bagan proses transaksi NCD. Terkadang, *visual image* ini terlihat dimanfaatkan langsung oleh narasumber sebagai pendukung penjelasannya (melalui layar televisi yang berada di tengah mereka, menghadap kamera).

Posisi duduk Hary Tanoesodibjo juga menarik untuk dikomentari. Ia duduk di sisi kanan, paling dekat dengan layar televisi yang diletakkan di depan dinding, menghadap kamera. Semacam *back-drop* sebuah acara. Dari posisi ini saja bisa dikatakan bahwa ia bintang acara, pemilik acara, dan pengendali acara yang sesungguhnya. Sebab, berulang kali ia di-*medium-close-up* tampak muka (menghadap kamera). Padahal narasumber lain yang di sudut, tidak diperlakukan demikian. Selain itu, ada operator di belakang layar yang siap-sigap melayani memunculkan visual yang mendukung.

Perangkat penalaran pertama, *roots*, mengindikasikan bagaimana tayangan membingkai sebab, yaitu

... Karena pada waktu itu saya berpegang pada "*silent is golden*," diam adalah terbaik. Tapi menjadi-jadi.

Appeals to principle, perangkat penalaran kedua, terpenuhi dengan adanya kalimat yang berbunyi

Saya senang sekali bahwa penindakan korupsi, tapi ini 'kan seperti jurus *mabok*. ... Jadi, artinya, jangan sampai semuanya dikatakan potensi kerugian negara dan yang kedua adalah memperkaya orang lain. Ini sesuatu yang harus ariflah (Eko B. Supryanto).

Eko B. Supryanto membeberkan klaim moral dalam sudut pandang *mainstream* yang ia yakini juga, meski dalam konteks ini moral sebagai pembenaran atas sesuatu yang belum tentu benar. Sebuah ironi.

Perangkat penalaran *consequences* — konsekuensi bingkai isu dalam tayangan — adalah tersajinya suguhan dialog yang secara khusus menjelaskan duduk perkara kasus NCD fiktif yang secara langsung maupun tidak langsung membela Hary Tanoesoedibjo sang pemilik stasiun (RCTI).

Dengan demikian, bingkai dialog khusus itu adalah "NCD milik CMNP tidak fiktif, tidak merugikan negara dan Hary Tanoesoedibjo tidak bersalah."

Sinyalemen bingkai semacam ini tertangkap KPI. Lembaga ini memanggil pihak RCTI membuat penjelasan karena tayangan dialog khusus itu ditenggarai menggiring opini publik. Namun, Hary Tanoesoedibjo dengan alasan yang masih bisa dipahami KPI, tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Gilang Iskandar, Harsiwi Achmad, dan Arlef Suditomo.

Hasilnya, terjadilah dialog yang normatif, dan berdurasi lebih kurang tiga jam.

Yang perlu diketahui adalah ketika program itu ditayangkan kami tidak ada niat untuk menggunakan frekuensi ranah publik untuk kepentingan Hary Tanoesoedibjo. Yang terpikir adalah tema itu sedang hangat dan kita ingin membuat dialog khusus. Tokoh-tokoh yang kami hadirkan sebenarnya juga diundang dalam *talkshow* lain. Jika KPI merasa penayangan tersebut tidak seimbang maka itu akan menjadi masukan. Di media-media lain banyak juga yang menulis dari sisi seberang Pak Hary Tanoesoedibjo yang tidak *balance* juga (Gillang Iskandar).

... yang bisa saya katakan adalah kita punya misi bahwa publik tidak boleh dicekoki oleh hal-hal yang tidak mengandung fakta. Saya turut serta dalam penggarapan, saya berusaha memilih orang yang independen dan tidak takut pada MNC. Bahkan kami pernah menghubungi Egy Sudjana dan beliau tidak paham masalahnya. Oleh karena itu, saya mengumpulkan data dan memformulasikannya ke dalam bentuk klarifikasi. Kami tidak menutup kemungkinan bagi orang yang melawan Hary Tanoesoedibjo, tapi kami tidak melakukannya karena memang bukan tugas kami. Kami ingin menggunakan frekuensi publik untuk kemaslahatan (Arief Soedtomono).

Dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan gambaran dari pengakuan pihak RCTI bahwa keberimbangan opini yang dituntut oleh jurnalisisme tidak terpenuhi, informasi yang hadir tidak *balance*.

Untuk membongkar realitas yang sebenarnya, saya juga melakukan wawancara rahasia dengan pihak bilik berita RCTI. Ketika peneliti menanyakan apakah tayangan *Dialog Khusus* itu permintaan Hary Tanoesoedibjo, atau kreativitas murni redaksi, ia menjawab:

Iya, atas permintaan MNC. Dan redaksi yakin apa yang dilakukan Pak Hary Tanoesoedibjo benar. Ada penjelasan kongkrit yang komprehensif atas kasus itu dan ada bukti-bukti. Jadi, redaksi merasa benar melakukan itu, karena masalahnya lebih kepada permainan antara Unibank dan oknum Bank Indonesia. Jika kita merasa benar, kita bantu. Redaksi intinya *mensupport* karena sudah *crosscheck*. Yang penting NCD itu tidak bodong, bahwa ada uang yang disetor. tapi dari prosesnya mungkin ada beberapa masalah. Sebelumnya, di redaksi juga terjadi perdebatan batin. Peristiwa ini seperti bermain judi. Dan ini soal pilihan. Semoga tidak salah pilih.

Jelas sekali: atas permintaan Hary Tanoesoedibjo. Sangat berbeda dengan kalimat Arief Suditomo:

Sebenarnya, penonton tidak tertarik pada isu ini, **namun saya tertantang untuk menampilkan acara ini.** Banyak sekali produser yang tidak mau menampilkan karena *rating*-nya turun.

Bahwa kemudian redaksi yakin bahwa mereka tidak sepenuhnya salah adalah pilihan yang telah melewati perdebatan batin. Ini bukan perkara *rating* ataupun tantangan seperti disampaikan Arief Suditomo di pertemuan KPI, tapi lebih pada bagaimana redaksi RCTI yang bekerja di bawah kekuasaan pemilik media mengakomodasi keinginan atau kebutuhan sang pemilik.

Pekerja memang kerap menghadapi perdebatan moral ketika mendapatkan kenyataan bahwa ia harus melakukan sesuatu yang tidak diketahui sepenuhnya, tidak ia yakini secara tuntas. Ia hanya percaya pada data dan penjelasan-penjelasan yang terus disampaikan oleh pemilik kasus tersebut.

Ini mengingatkan kita pada konsep kaum Marxian yang memandang dialektika sebagai proses perubahan melalui konflik. Suatu kontradiksi ditandai oleh aspek primer dan sekunder. Yang sekunder mengalah kepada yang primer, kemudian bertransformasi menjadi aspek kontradiksi baru.

Konflik nurani awak bilik berita bergemuruh (aspek sekunder) mempertaruhkan nilai idealisme. Namun, pada akhirnya, pertarungan bathin itu bertekuk-lutut pada aspek primer. Dalam pandangan Gramsci, jika gagasan kelompok dominan/berkuasa diterima sebagai *common sense*, hegemoni telah terjadi. Berikut jawaban narasumber sehubungan dengan pertentangan batin yang terjadi.

Tadinya saya ragu, tapi ada karena penjelasan komprehensif berikut bukti-bukti saya kemudian yakin. Saya juga ingat para filsuf tasawuf yang mengatakan bahwa "di dalam kebenaran, ada kesalahan dan di dalam kesalahan ada kebenaran." Jadi, harus yang mana? Itu tinggal perkara komposisi mana yang lebih besar. Hary Tanoe bukan malaikat, dan Egy Sudjana juga bukan setan. Mereka manusia. Malah, akhirnya saya punya inisiatif melakukan *roadshow* ke beberapa media massa seperti *Bisnis Indonesia*, *Kontan*, *Tempo* dan *SCTV*. Di sana Hary Tanoe menjelaskan duduk perkaranya.

Wawancara itu juga menjawab ketidakberimbangan informasi karena tidak adanya narasumber yang kontra dan bisa mendebat memang disengaja. Ketika itu saya bertanya, mengapa nama-nama itu menjadi narasumber acara. Narasumber menjawab:

Nama-nama itu muncul dari pelinggai MNC.

Saya bertanya lagi, mengapa Egy Sudjana tidak diundang sebagai narasumber, dia menjawab:

Perhatin *ngga*, di awal Egy Sudjana 'kan muncul dalam bentuk *package* dan posisinya sebagai *trigger*. Durasinya lumayan lho, hampir satu segmen.

Saya bilang, meskipun begitu, Egy tidak bisa mendebat langsung. Tanggapannya:

Ya, *ngga* mungkinlah. 'Kan kondisinya untuk mendukung Hary Tanoe.

Tergambar sekali, narasumber diundang untuk mendukung pernyataan Hary Tanoesoedibjo yang tampil sebagai narasumber utama yang durasi pembicaraannya melampaui narasumber lain.

Narasumber rahasia mengatakan bahwa sejauh ini Hary Tanoe cukup paham bahwa independensi bilik berita tidak boleh diintervensi. Menurut narasumber, Hary juga memiliki idealisme menolak program mistis, seks, dan kekerasan. Dialog ini, katanya, cenderung ditujukan untuk menjaga citranya sebagai taipan media massa.

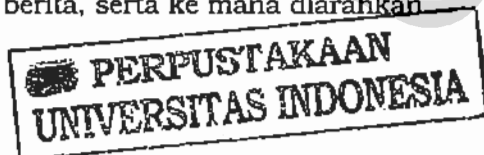
Menurut saya, pemahaman seorang pemilik media atas independensi bilik berita tidak lantas menjadikannya sama sekali tidak memanfaatkan media untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Itu hanya persoalan waktu.

Kepentingan ekonomi membuat pemilik media lebih memperhatikan pasar, sedangkan kepentingan politik mendorongnya memeralat media sebagai *public relation* atau *spin doctor* untuk diri atau kelompoknya.

Narasumber rahasia sendiri juga mengatakan:

Dalam kajian media global juga dikatakan kalau konsentrasi kepemilikan itu bahaya karena berpengaruh kepada *policy newsroom*. Bisa terjadi penurunan kualitas berita. Di Indonesia, yang sangat khas terjadi di bisnis televisi adalah "run by the owner." Pemilik berorientasi ke pasar maka, ia akan berkiblat ke pasar. Jika ia berorientasi pada kekuasaan, media massa dibawa untuk memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan.

Dalam pandangan strukturalisme, kandungan *Dialog Khusus RCTI* semata-mata merupakan representasi struktur yang mengabaikan interaksi sosial antaragen. Termasuk peluang para jurnalis memproduksi berita sebagaimana mereka inginkan. Menguatkan itu, pendekatan ekonomi politik memandang kandungan media ditentukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar bilik berita. Faktor pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih mempengaruhi dan menentukan peristiwa apa saja yang bisa tampil dalam berita, serta ke mana diarahkan.



❏ **Pemberitaan NCD Fiktif di Trijaya FM**

Berdasarkan wawancara rahasia dengan awak *Trijaya FM* yang berkedudukan di Menara Kebon Sirih, kasus NCD fiktif yang melibatkan Hary Tanoesoedibjo tidak muncul secara utuh dan mendalam dalam pemberitaan. Ada reportase, tapi melewati penyaringan terlebih dahulu. *Trijaya* hanya menamakan kasus dengan 'NCD' tanpa 'fiktif' atau 'bodong.' Selain itu, juga ada dialog interaktif dalam acara rutin *Jakarta First Channel*. Hanya satu narasumber yang dihadirkan. Sebagaimana dalam *Dialog Khusus RCTI*, narasumber itu ditentukan MNC. Jika begitu, meski saya tidak mendengarkan langsung dan tidak berhasil mendapatkan *script* atau *taping* dialog, bisa ditebak pesan apa yang diamanatkan: membela Hary Tanoesoedibjo.

❏ **Pemberitaan NCD Fiktif Di Trust**

● **Trust Medium Cetak**

Trust mengeluarkan dua buah artikel. Judulnya "Ini Tinggal Urusan Bayar atau Tidak Bayar" dan "Ada Apa dengan BI?" Sampul majalah berita ekonomi dan bisnis edisi 19 Tahun IV, 20-26 Februari 2006 ini berjudul "Kisah di Balik NCD Unibank." Pelengkap artikel "Ini Tinggal Urusan Bayar atau Tidak Bayar" berupa:

- a. Foto salah satu pemandangan ketika Unibank dibekukan. Di depan bank yang tutup, nasabah memperhatikan pengumuman BBUK sedangkan yang lain terlihat dalam ekspresi yang kosong. Di bawah foto, tertulis "Masih Terbelilit Soal NCD."
- b. Foto *close up* dengan tulisan Hary Tanoesoedibjo di bawahnya.
- c. Salinan dokumen surat-menyurat yang berkaitan dengan NCD CMNP yang memiliki kop surat Unibank.
- d. Tabel susunan pemegang saham CMNP, Drosophilla, dan Bhakti Investama saat Transaksi

Sedangkan artikel kedua yang berjudul "Ada Apa dengan BI?" didukung ilustrasi:

- a. Foto gedung PT CMNP Tbk. Di bawah foto itu ada tulisan, "Sekarang sepenuhnya jadi persoalan antara CMNP dan Pemerintah."
- b. Foto beberapa tokoh yang di bawahnya diberi nama: Arifin P. Soeria Atmadja, Pradjoto dan Lucas.

Metaphors dapat ditemukan dari dua perumpamaan dalam artikel pertama yakni "biang keladi" dan "gigit jari" yang berasal dari kalimat:

1. Bos dari PT Bimantara Citra ini disebut-sebut sebagai **biang keladi** munculnya NCD bodong yang—kata mereka—merugikan negara sebesar US\$28 juta.
2. ... jika putusan akhir dari MA membatalkan vonis dua pengadilan tersebut, CMNP terpaksa harus **gigit jari**.

'Biang keladi,' dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1991) punya beberapa makna, dan yang merujuk konteks kalimat di atas adalah "orang yang menjadi kepala penjahat atau pemimpin (penganjur dsb) sesuatu perbuatan jahat." Dalam kamus yang sama, salah satu makna 'gigit jari' adalah "kecewa" (karena tidak mendapat apa-apa).

Selanjutnya, *catchphrases* yaitu frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana berupa jargon dan slogan adalah

Namun, sayangnya, **kendati dinyatakan sah, NCD ini juga memiliki beberapa kelemahan**. Di antaranya, seperti disebutkan di atas, sertifikat itu memakai mata uang dollar dan berjangka waktu tiga tahun alias setahun lebih panjang dibanding batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Paling tidak, sang auditor tidak menemukan adanya surat dari BI yang melarang atau merestui diterbitkannya NCD tersebut. Sehingga, ia berasumsi, sertifikat ini "**termasuk penyimpangan yang telah mendapat persetujuan BI.**"

Kalimat "... sayangnya, kendati sah, NCD ini juga memiliki beberapa kelemahan" sekilas jujur. Tapi, muatannya bertolak belakang. Maksudnya, ketika sudah dikatakan NCD sah, seharusnya tidak ada lagi penjelasan yang bisa menggagalkan kondisi itu. Dalam kalimat ini kegagalan itu terjadi tanpa disadari penuturnya. Selain itu, "... termasuk penyimpangan yang telah mendapat persetujuan BI" merupakan kalimat cerdas, tapi kurang taktis untuk menyelamatkan kenyataan akan tersiratnya pengakuan bahwa dalam penerbitan NCD itu ada penyimpangan yang "disetujui oleh pihak BI." Padahal BI tidak menyetujuinya. BI hanya tidak melakukan tindakan apa pun yang mencegah terbitnya NCD fiktif itu. Ketidaktelitian ini dimanfaatkan untuk memaknainya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun *exemplaar* bingkai ini adalah

Pertama, "Kasus NCD adalah Masalah CMNP dan BI (Pemerintah)":

1. Teras beritanya dokumen-dokumen resmi menunjukkan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank adalah sah. Ini merupakan transaksi bisnis biasa, tanpa benturan kepentingan. Persoalannya tinggal apakah pemerintah mau membayar atau tidak?
2. Surat berharga ini menjadi masalah lantaran, setelah Unibank ditutup, **pemerintah**—sebagai penjamin simpanan dana pihak ketiga—**tidak mau membayarnya**.

Potongan bingkai di atas ingin mengatakan bahwa ini bukan kasus Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo, atau Drosophila atau bukan lagi masalah Unibank —karena sudah BBKU— tapi masalah CMNP dan BI. Masalah siapa yang menuntut dibayar dan siapa yang harus membayar. Intinya itu.

Kedua, "NCD Unibank Sah":

1. Menurut Hary, **NCD Unibank yang dijualnya ke CMNP tidak bodong alias sah**.
2. Banyak media yang lebih memilih mengatakan NCD fiktif, NCD bodong atau ada juga NCD milik CMNP, tapi dalam artikel ini, TRUST memilih menonjolkan lembaga yang menerbitkannya sehingga tersebutlah NCD Unibank.

Ketiga, "BI harus Bertanggungjawab":

1. Ini Tinggal Urusan Bayar atau Tidak Bayar (yang merujuk tanggung jawab BI).
2. Walaupun diterbitkan dalam mata uang dollar, jika mendapat persetujuan BI, keberadaan sertifikat itu adalah sah. Apalagi kalau tercatat dalam pembukuan yang setiap minggu dan setiap bulan dilaporkan ke Bank Indonesia. "Berarti, NCD itu tidak bodong dan masuk ke dalam program penjaminan pemerintah." Nah, karena masuk dalam program penjaminan, maka — tidak seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan — dalam hal ini negara tidak pernah dirugikan. "Iya dong. Seandainya NCD itu telah dilaporkan ke BI tapi tiba-tiba BI mengabaikan, maka bisa disimpulkan bahwa BI mengelak dari tanggung-jawab." (Pradjoto).

Artikel ini memiliki kepentingan inti menempatkan BI sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dengan alasan bahwa semua kesalahan bermuara pada BI. Tak heran apabila judulnya "Ini Tinggal Urusan Bayar atau Tidak."

Adapun *depiction* ditandai dengan kalimat-kalimat di bawah ini:

1. Ada beberapa "argumen" yang dipakai untuk menuduh Hary. Salah satunya lantaran PT Bhakti Investama Tbk (*broker* transaksi NCD tersebut) dan Drosophila Enterprise Pte. Ltd. (pemegang NCD Unibank yang dijual kepada CMNP) sama-sama dimiliki oleh Hary. Disinilah, konon, terjadinya benturan kepentingan.

2. ...sertifikat ini "termasuk penyimpangan yang telah mendapat persetujuan BI".

'Argumen' ditulis di antara tanda petik, karena penulisnya ingin menunjukkan makna argumen harus dipahami dari sisi yang berbeda dengan makna denotasinya. Bisa jadi kata pengganti yang tepat untuk menunjukkan makna konotasinya adalah "pembenaran," sehingga 'argumen' yang dimaksud Pradjoto adalah "argumen yang salah, tapi diperlakukan seolah benar adanya."

Adapun kata 'penyimpangan' menjelaskan bahwa telah terjadi proses yang tidak sesuai dalam penerbitan NCD yang dikatakan fiktif itu. Penyimpangan ini seakan terlihat "benar," karena telah mendapat persetujuan BI. Padahal, BI tidak memberikan persetujuan atas penyimpangan itu.

Visual Images yang mendukung bingkai secara keseluruhan mewujud dalam:

1. Foto salah satu pemandangan ketika Unibank di BBKU: di depan bank yang tutup, nasabah memperhatikan pengumuman BBKU sedangkan yang lain terlihat dalam ekspresi yang kosong. Di bawah foto tertera kalimat "Masih Terbelilit Soal NCD."
2. Foto *close up* dengan tulisan Hary Tanoesoedibjo di bawahnya.
3. Salinan dokumen surat-menyurat yang berkaitan dengan NCD CMNP yang memiliki kop surat Unibank.
4. Tabel susunan pemegang saham CMNP, Drosophila, dan Bhakti Investama.

Melalui foto pertama, penulisnya ingin mengatakan bahwa meskipun telah dibekukan, Unibank masih saja menyisakan masalah, seperti kalimat yang tertera dibawahnya, "Masih Terbelilit Soal NCD." Sebetulnya kata 'terbelilit' tidak ada dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yang ada, kata 'terbelit' dari akar kata 'belit.' Apabila kedua kata itu dimaksudkan sama, maknanya "kusut, sulit sekali — menyelesaikan masalah itu."

Pas foto berwarna Hary Tanoesoedibjo berukuran 6 x 7 membicarakannya sebagai korban sentral kasus NCD Fiktif. Sedangkan dokumen-dokumen berkop Unibank menandakan mereka bicara dengan bukti-bukti yang jelas.

Pada tabel susunan pemegang saham CMNP, Drosophila, dan Bhakti Investama tidak terdapat data mengenai tahun berapa data itu berlaku. Saya menyinggung ini karena artikel situs *Warta Ekonomi* menginformasikan bahwa sejak bulan Agustus 2002, Hary Tanoesoedibjo memiliki saham di CMNP melalui Bhakti Investama.

Ia membeli saham yang dimiliki oleh Steady Safe sebesar 13,7 persen. Jika diselaraskan, data ini tidak harmonis. Dalam tabel pendukung, kepemilikan saham Steady Safe yang tertulis adalah 13,2 persen.

Adapun *roots* dalam artikel ini:

1. Kematian Unibank, yang dibekukan pada 29 Oktober 2001, ternyata berbuntut panjang..
2. Kelak, kalau Mahkamah Agung kembali menguatkan keputusan yang sudah diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi, maka—suka atau tidak suka—pemerintah harus membayar kewajiban tersebut.

Appeals to Principle atau klaim-klaim moral dalam artikel Pradjoto dikatakan:

Seandainya NCD itu telah dilaporkan ke BI tapi loba-loba BI mengabaikan, maka bisa disimpulkan bahwa BI mengelak dari tanggung jawab, bukan begitu?

Pradjoto ingin menunjukkan siapa salah. Kelalaian BI, baginya, sangat fatal. BI dianggap bertanggungjawab. Di situlah letak klaim moral Pradjoto.

Consequences bingkai adalah "Hary Tanoesoedibjo dan Bhakti Investama tidak terkait, dan BI harus bertanggungjawab."

Dengan demikian, bingkai keseluruhan adalah "Kasus NCD adalah masalah CMNP dan BI (Pemerintah). NCD Unibank sah, BI harus bertanggungjawab."

Dalam artikel kedua berjudul "Ada Apa dengan BI?" bingkainya adalah "NCD tidak menimbulkan kerugian negara." Penulis artikel ini lebih senang menyebut kasus dengan NCD saja, tanpa 'fiktif' atau 'bodong.'

Tidak banyak *metaphors* yang bisa ditemui dalam artikel yang lebih singkat daripada yang pertama ini. Perumpamaan yang ada hanyalah "almarhum," untuk menyatakan bahwa Unibank sudah dibekukan.

Adapun *catchphrases*-nya — "tentu ada sesuatu yang tidak beres di BI" — adalah tudingan yang menonjol karena judulnya kalimat tanya "Ada Apa dengan BI?"

Exemplaar bingkai bahwa "NCD tidak merugikan negara" adalah

Kalau kasus ini disebut telah menimbulkan kerugian negara sehingga ditangani KPK, itu salah besar (Arifin B. Soeria Atmadja).

Arifin B. Soeria Atmadja berpendapat kasus NCD yang bermasalah itu tidak merugikan negara sehingga perkaranya tidak

boleh ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), melainkan pengadilan umum saja. Pernyataan ini juga sekaligus mengarahkan bahwa takada pihak yang korupsi, terutama Hary Tanoesoedibjo.

Depiction ditemukan pada dalam kalimat berikut.

Kalau ada yang bilang CMNP merugi, itu karena NCD-nya belum bisa dicairkan. Itu berarti terjadi gagal bayar. Jadi, bukan karena NCD itu bodong. Asal tahu saja, NCD itu disebut bodong jika dananya masuk ke kantong pribadi dan tidak masuk ke kas perusahaan.

Ada hal yang sangat menarik dalam *visual images*, yaitu foto tiga tokoh yang dimintai keterangan seputar kerugian negara. Artikel mewawancarai empat nama, yakni Arifin P. Soeria Atmadja, Pradjoto, Lucas, dan Lucas Budiono. Jika fotonya hanya ada tiga berarti kedua nama Lucas itu merujuk satu orang yang sama. Yang artinya, orang ini adalah kuasa hukum PT CMNP sekaligus kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo. Pantas saja, pandangannya selalu membela Hary Tanoesoedibjo, dan tentu saja, CMNP, karena merupakan klien-kliennya. Seharusnya, pihak CMNP sebagai korban utama dalam kasus ini menyatakan ketidakpuasan atas transaksi NCD.

Melihat data lain, saya akhirnya memaklumi kenapa Hary Tanoesoedibjo demikian mendapat tempat yang layak untuk dibela oleh pihak yang akan merugi. Selain satu kuasa hukum dengan CMNP, saudara kandungnya yang juga orang penting dalam CMNP setelah Hary Tanoesoedibjo memiliki saham di CMNP sejak 2002.

Roots atau kausalitas bingkai ini adalah

1. Kalau saja Unibank tidak dibekukan, transaksi ini tidak akan menjadi polemik berkepanjangan.
2. Ya, pembekuan Unibank dituding sebagai awal dari NCD bermasalah yang melibatkan pihak, yang ternyata merupakan raja media.

Appeals to principle, terpenuhi dengan kalimat

Kalau tak ada dana yang masuk, dan NCD-nya fiktif, maka tuduhannya bukan lagi korupsi, melainkan sudah merupakan tindak kriminal.

Kalimat di atas memang memiliki unsur prinsip yang tegas, tapi sayangnya digunakan untuk hal sebaliknya.

Consequences adalah bahwa "persengkatan NCD tidak sepatutnya di tangani KPK, tapi pengadilan umum." Kesimpulannya, NCD tidak menimbulkan kerugian negara.

▣ Trust Medium Online

Bingkai artikel *online* berjudul "Mengikuti Jejak Lama Sukanto Tanoto, Aktor Utama Kasus NCD" adalah bahwa nama-nama itu aktor utama kasus NCD. Ini pasti untuk mengalihkan fokus yang sangat menunjuk Hary Tanoesoedibjo. Untuk kepentingan itu, dikemukakanlah sejarah-sejarah kasus yang pernah menimpa Sukanto Tanoto.

Ada satu *metaphors* yang bisa ditemui, yakni "dianaktirikan," yang menggambarkan kondisi seseorang yang diperlakukan dengan tidak baik, meski tidak semua demikian.

Catchphrases adalah sebagai berikut.

1. Sampai di sini, kelihatannya semua berjalan lancar. Artinya, secara langsung Sukanto **mengakui** kewajibannya sekaligus menyatakan sanggup membayar...
2. Tapi, entah apa yang terjadi, ... sehingga Syafruddin Arsyad Temenggung (pengganti Putu) menurunkan sebuah "surat bebas."

Lalu *exemplaar* didukung oleh kalimat:

1. Ia (Sukanto Tanoto) dikenal sebagai usahawan yang berhasil meniti sukses dari tangga paling bawah. **Namanya pernah menjadi bahan pembicaraan di ajang nasional lantaran PT Inti Indorayon Utama miliknya yang berlokasi di Porsea, Sumatra Utara, dianggap telah mencemari lingkungan.**
2. Pengalihan saham tersebut (oleh Sukanto Tanoto), maka tidak ada pemegang saham mayoritas di Unibank yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Kalimat di atas ingin mengungkapkan perilaku Sukanto Tanoto yang kurang berbudi sudah ada sejak lama. Perbuatannya memecah saham Unibank juga mengakibatkan tidak ada satu pun orang dalam yang ketika itu pemilik Unibank bisa dituntut tanggung jawabnya.

Adapun wujud dari penggambaran atau pelukisan suatu isu secara konotatif (*depiction*) adalah

Sayangnya, pihak RGM tak mau membahas ihwal gonjang-ganjing ini.

Pemilihan kata 'gonjang-ganjing' bertujuan mengilustrasikan kasus NCD yang berdampak pada kondisi yang *senyawut*, terutama bagi pihak RGM, perusahaan lain yang erat kaitannya dengan Sukanto Tanoto.

Roots mengindikasikan hubungan sebab-akibat. Artikel ini menulis:

Pengalihan saham tersebut, maka tidak ada pemegang saham mayoritas di Unibank yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Appeals to principle terpenuhi dengan adanya kalimat:

Kelemahan atau kelalalan atau mungkin kekhilafan Bank Indonesia juga tampak pada proses penutupan Unbank. Sebab, kendati sebelumnya dikenal sebagai bank yang solid (bahkan pernah mendapat peringkat A), sebenarnya pada tahun 1988 Unbank sudah masuk ke dalam program pembinaan BI.

Sang penulis ingin menghadirkan nuansa kesalahan BI. Ternyata, BI merupakan musuh besar media-media milik Hary Tanoesoedibjo yang mengangkat berita tentang kasus NCD.

Consequences dipenuhi dengan kalimat:

Sukanto Tanoto layak menjadi fokus utama.

■ SIMPULAN

Inti pola adalah tindakan mendukung pemiliknya yang terbelit kasus NCD fiktif. Di *RCTI*, dengan *Dialog Khusus*: "Kontroversi NCD Bodong." *RCTI* memilih membela Hary Tanoesoedibjo secara terbuka. *Dialog Khusus* itu juga melewati proses dialektika yang mengeliminasi pihak primer. Hasilnya, sebuah dialog yang berbingkai: "NCD milik CMNP tidak fiktif, tidak merugikan negara, dan Hary Tanoesoedibjo tidak bersalah." Pilihan bilik berita sebetulnya sempit dan jelas: mendukung, atau bersedia karam.

Di *Trijaya FM*, pembelaan terhadap pemiliknya tertual dengan cara samar. Hasil reportase yang tidak mendalam masih juga melewati penyelarasan, proses penyuntingan yang tidak memojokkan sang pemilik. Demikian juga dialog interaktif, *Jakarta First Channel*. Semuanya ala kadar, dengan sengaja.

Adapun *Trust* melakukan pembelaan dengan energi yang setara dengan *RCTI*. Tidak tanggung, mereka menurunkan tiga artikel sekaligus di dua medium yang berbeda, yakni dua artikel di cetak dan satu di situs *online*. Versi *online* diturunkan lebih dulu pada tanggal 9 April 2006, sedangkan dua artikel di versi cetak dipublikasikan pada tanggal yang sama dengan penayangan *Dialog Khusus RCTI*, yaitu 20 Februari 2006. Tidak berlebihan kiranya apabila saya mengatakan bahwa mereka saling mengkonfirmasi isi berita karena artikel berjudul "Ini Tinggal Urusan Bayar atau Tidak" hampir mirip dengan kandungan *Dialog Khusus RCTI*.

Pola ini mengingatkan kita dengan analisis strukturalis Althusserian yang mengatakan bahwa karakteristik teks isi media semata-mata representasi struktur yang ada, mengabaikan interaksi sosial antaragen, termasuk peluang jurnalis memproduksi berita sebagaimana mereka inginkan.

Apalagi yang bisa dikatakan selain mengingatkan bahwa kepemilikan silang media massa sangat memungkinkankan baron media mempengaruhi pemberitaan di lintas media massa dan lintas segmen, sehingga mempertaruhkan independensi jurnalistik demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Dengan kata lain, opini publik dikepeng dari segala penjuru untuk kemenangan kapital dan kapitalis. Benar juga apa yang dikatakan Marxian bahwa dialektika sebagai suatu proses perubahan melalui konflik. Kontradiksi ditandai oleh aspek primer dan sekunder, yang sekunder mengalah pada yang primer, kemudian bertransformasi menjadi kontradiksi baru.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Arwan Tuti (2002). *Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: AK Group.
- Artz, Lee dan Yahya R. Kamalipour (2003). *Globalization of Corporate Media Hegemony*. New York: State University of New York Press.
- Bagdikian, Ben H. (1997). *The Media Monopoly*. Fifth Edition. Boston: Becon Press.
- _____ (2004). *The New Media Monopoly*. New Edition. Boston: Becon Press.
- Boyd-Barret, Oliver dan Chris Newbold (1995). *Approach to Media A Reader*. London: Arrowsmith.
- Current, James dan Michael Gurevitch (1992). *Mass Media and Society*. New York: Routledge, Chapman and Hall.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publitions.
- Downing, John D. H. (2004). *The Sage of Media Studies*. London: Sage Publications.
- Gazali, Effendi et al (2003). *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran (Plus Acuan tentang Penyiaran Publik & Komunitas)*. Jakarta: Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Habermas, Jurgen (1971). *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press.
- Hidayat, Dedy N., Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi S.K. (2000). *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawanto, Budi (1999.) *Film, Ideologi dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kellner, Douglas (1989). *Critical Theory, Marxism and Modernity*. Polity Press with Basil Blackwell, Cambridge and Oxford.
- Laurence. Neumann, W. (1997). *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. MA: Third Edition. Ally and Bacon. Needham Heights.
- Littlejohn, Stepen W. (2005). *The Theories of Human Communication*.

- Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.
- Miles, Mathew B & A. Michael Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mosco, Vincent (1999). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. London: Sage Publications.
- Murdock, Graham dan Peter Golding. 1997. *The Political Economy of The Media*. Volume 1. Edward Elgan.
- Narwaya, Tri Guntur (2006). *Matinya Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nimmo, Dan (1978). *Polical Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publishing Company.
- Nugroho, Yunlawan W. (2004). *Politik Indonesia di Mata Wartawan Politik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Rachbini, Didik J. (2001). *Politik Ekonomi Baru: Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Pahlemy, Wenny (2006). "Jika Hary Tanoë Tersandung NCD." Dalam *Media Watch The Habibie Center*. Edisi No. 43 Maret/15 Maret-15 April.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan XII. Jakarta: Balai Pustaka 1991.
- Sartre, Jean Paul (2004). *Dogmatik Kritik*. Cetakan 1. Edisi Indonesia. Jakarta: Celepuk.
- Schudson, Michael (1996). *The Power of News*. Second Printing. President and Fellows of Harvard College.
- Sudibyo, Agus (2004). *Ekonomi Politik Media Penylaran*. Jakarta: ISAI bersama LKIS.
- Yln, Robert K. (2004). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Cetakan Kelima Jakarta: Rajawali Pers.

☒ Catatan

¹Tokoh antagonis dalam film kolosal bertlatar Romawi, *Julius Caesar*.

²F. Budi Hardiman (1993) mengatakan bahwa dalam tulisannya seperti *Tecnology and Science: Marxism as Critique; Public Sphere, Legitimatton Problem in The Modern State dan Legitimatton Crisis*, Habermas menyebut-nyebut sistem masyarakat dewasa ini sebagai masyarakat 'kapitalisme-lanjut' (*spatkapitalismus*). Atau *late capitaltsm*, dalam bahasa Inggris.